

Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting

Chairul Rizal^{1*}, Supiyandi², Muhammad Amin¹

¹Sains dan Teknologi, Sistem Komputer, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

²Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}chairulrizal@dosen.pancabudi.ac.id, ²supiyandi@dosen.pancabudi.ac.id, ³muhammadamin@dosen.pancabudi.ac.id,

Email Penulis Korespondensi: chairulrizal@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak—Tata kelola pemerintahan yang buruk yang dilakukan oleh sebagian pelaku ekonomi, merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sehingga munculnya ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang salah satu bentuknya adalah penerapan e-government. E-government adalah bentuk teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dimana dapat memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satu hasil pengembangan dari e-government adalah e-Village Budgeting. E-village budgeting merupakan aplikasi manajemen penganggaran desa berbasis online dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terkait dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang tidak tertib, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan penyimpangan penggunaan anggaran. Penelitian ini akan dirancang suatu aplikasi berbasis web yang dapat membantu membuat pelaporan keuangan menjadi lebih mudah. Aplikasi tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan

Kata Kunci: e-Village Budgeting; Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract—Bad governance or poor governance by some economic actors is one of the causes of the economic crisis in Indonesia. So that the emergence of public mistrust of government performance. To restore public confidence to the government, good governance is needed, one of which is the application of e-government. E-government is a form of information and communication technology by the government which can provide information and services to the public, business affairs, and matters relating to government. One of the results of the development of e-government is e-Village Budgeting. E-village budgeting is an online-based village budget management application in order to increase transparency and accountability of the village budget. One of the problems that often arises in the administration of village governance is related to the administrative system of village financial management that is not orderly, so that not a few that cause problems of irregularities in the use of the budget. This research will be designed a web-based application that can help make financial reporting easier. The application was made so that budgeting and development monitoring in remote villages are more transparent.

Keywords: e-Village Budgeting; Management Village Financial

1. PENDAHULUAN

Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan merupakan sebuah desa yang memiliki potensi yang besar dalam hal pertanian. Desa Tomuan Holbung merupakan desa dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Terdapat 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yaitu Desa Bandar Pasir Mandode, desa Gotting Sidodadi, Desa Huta Padang, Desa Bagasan, Desa Sei Kopas, Desa Silau Jawa, Desa Suka Makmur, Desa Tomuan Holbung. Terdapat 10 Dusun yang ada didesa Tomuan Holbung, dimana mayoritas warganya adalah suku Batak, Jawa, dan suku lainnya, mata pencarian warga adalah Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga bekerja sebagai Karyawan di PT. Bakrie Sumatra Plantation (BSP)[1][2]. Aplikasi[3] menjadi jalan kemudahan bagi manusia dalam berkomunikasi dan mencari sebuah sistem[4] informasi yang ada di dunia saat ini[5]. Desa Tomuan Holbung[6] merupakan salah satu desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang berasal dari pemekaran Padang Huta dengan dasar Undang-Undang Peraturan Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Asahan sehingga Desa Tomuan Holbung saat ini terdiri dari Dusun X[7].

Penduduk Desa Tomuan Holbung[8] yang berjumlah 2.673 jiwa yang terdiri dari 1.244 laki-laki dan 1.429 perempuan, memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang terdiri dari 1.762 Islam, dan 911 Kristen[9]. Mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. Masyarakat Desa Tomuan Holbung masih menjunjung tinggi sifat gotong royong dan kekeluargaan dalam kehidupan sosialnya. Hal ini terlihat dengan aktifnya organisasi STM (serikat buruh membantu) yang kegiatannya menjenguk orang sakit atau musibah tanpa memandang keyakinan agamanya. Pada umumnya sebagian besar masyarakat desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge bermata pencaharian sebagai petani, pegawai swasta, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat desa Tomuan Holbung adalah sepeda motor. Di desa ini sarana transportasi seperti bus atau angkutan umum belum tersedia, karena jalan masuk ke Desa Tomuan Holbung masih belum berupa jalan beton yang diaspal oleh pemerintah.

Menurut [10] menyatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance.

Salah satu strategi untuk mewujudkan good and clean government adalah dengan menerapkan electronic government yang merupakan suatu inovasi dari sektor publik. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Di Indonesia pelaksanaan penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government Indonesia. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem pengelolaan serta proses kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Salah satu hasil pengembangan dari e-government adalah e-Village Budgeting. E-village budgeting merupakan aplikasi manajemen penganggaran desa berbasis online dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terkait dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa yang tidak tertib, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan penyimpangan penggunaan anggaran. Melalui program e-Village Budgeting ini semua pengelolaan keuangan desa dijadikan satu dalam sistem online.

Sistem penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa yang akan mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki tujuan dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Laporan keuangan desa akan menjadi suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Namun pada kenyataannya permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang tertib, sehingga menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran.

Sistem e-Village Budgeting yang menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten diharapkan mampu melakukan monitoring anggaran, memastikan program pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin penggunaan anggaran tetap sasaran serta mewujudkan transparansi di sektor publik. Terdapat tiga tahap dalam e-Village Budgeting di desa Tomuan Holbung Kabupaten Asahan yaitu perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

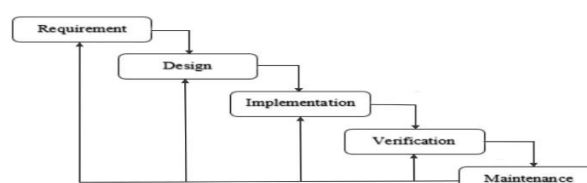
Desa Tomuan Holbung menjadi pelopor dalam pembuatan software aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Payung-payung hukum Desa Tomuan Holbung untuk implementasi Undang-Undang Desa sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Penggunaan e-Village Budgeting juga sebagai sikap preventif dari penyelewengan dana desa dengan maksud untuk memberikan pembedayaan kepada aparatur desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan berkenaan dengan e-Village Budgeting salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan sistem tersebut. Sesuai dengan saran dari penelitian sebelumnya [11] untuk melihat keefektifan penggunaan e-Village Budgeting. Perbedaan lokasi tersebut dapat menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan penerapan e-Village Budgeting. Hal itu dikarenakan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia dan hambatan lain seperti kesenjangan akses internet antara desa yang berlokasi di kota dan di desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode air terjun sering dikenal dengan metode waterfall atau dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), Metode ini menjelaskan tentang alur pembuatan sistem secara sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, diawali dengan menentukan spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna kemudian melewati beberapa proses seperti perencanaan (planning), permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem ke para pengguna (deployment) dan diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan [23]. Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

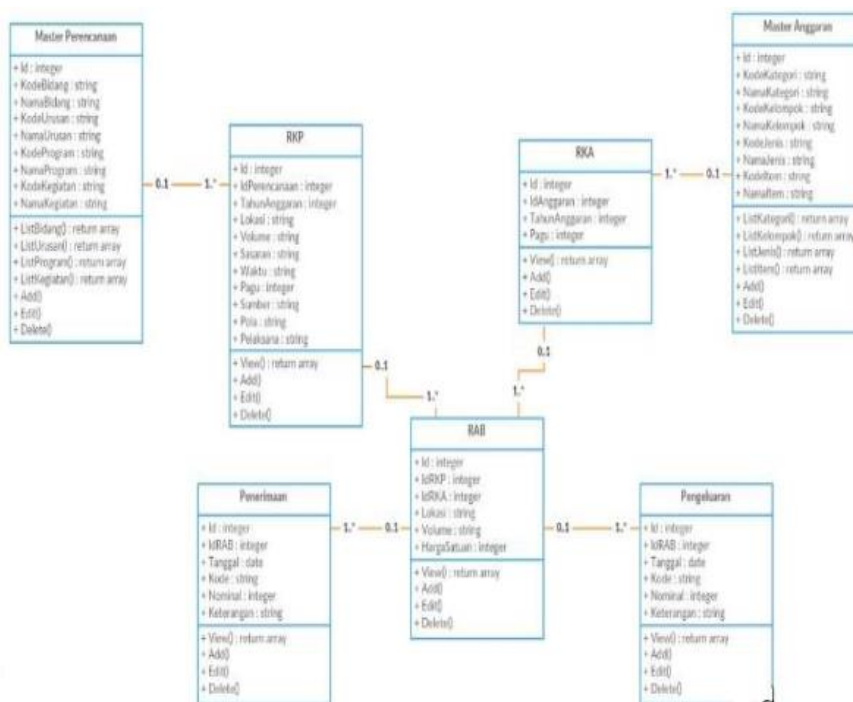


Gambar 1. Metode Waterfall

data yang terdapat didalam sistem, Bendahara Desa dapat mengakses penerimaan dan pengeluaran, Sekretaris desa dapat mengakses RKP, RKA, RAB.

3.2 Class Diagram

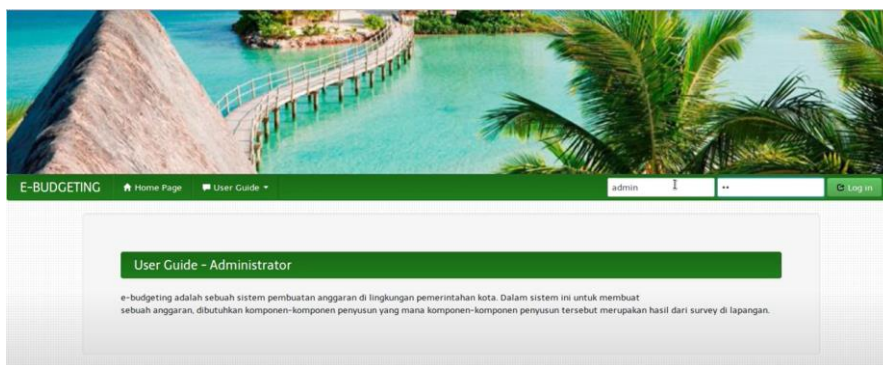
Class diagram adalah model yang menggambarkan struktur dan deskripsi class serta hubungannya antara class. Class diagram mirip dengan ER-Diagram.



Gambar 3. Class Diagram

3.3 Implementasi

Pengguna dapat login ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password dan menekan tombol “Login” untuk masuk ke dalam sistem.



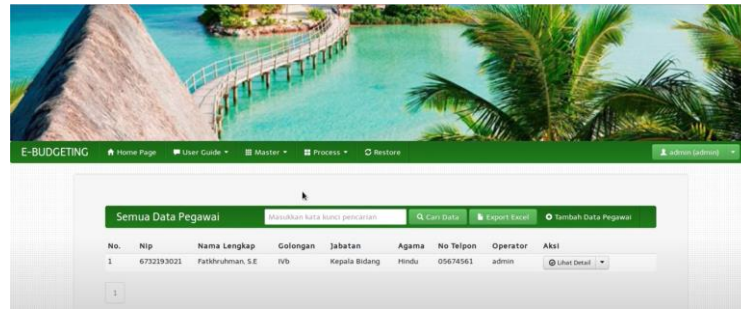
Gambar 4. Halaman Login

Untuk masuk ke menu utama admin harus berhasil login terlebih dahulu. Setelah itu sistem akan terbuka.



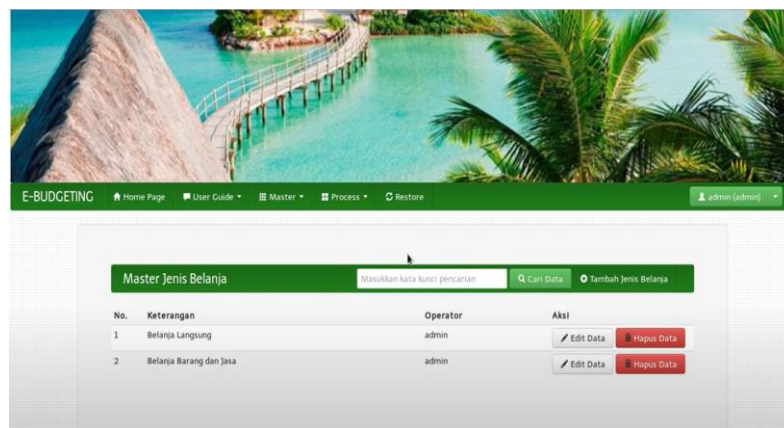
Gambar 5. Halaman Utama

Halaman ini digunakan untuk menginputkan data-data pegawai serta mengupdate data-data pegawai dalam sistem e-budgeting.



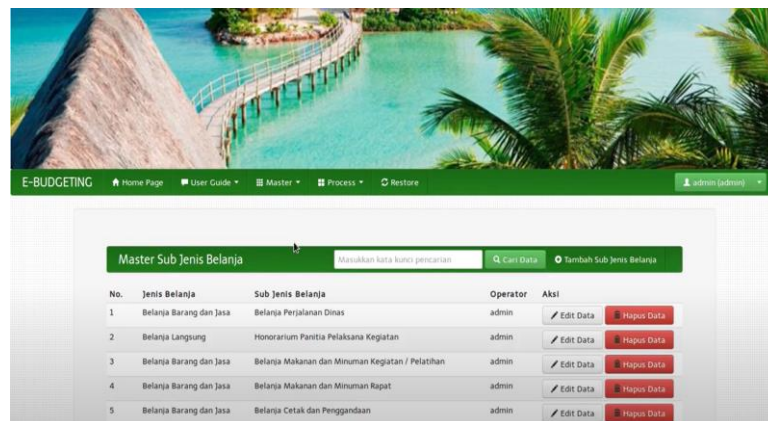
Gambar 6. Halaman Master Data Pegawai

Halaman ini digunakan untuk menginputkan jenis belanja dalam sistem e-budgeting



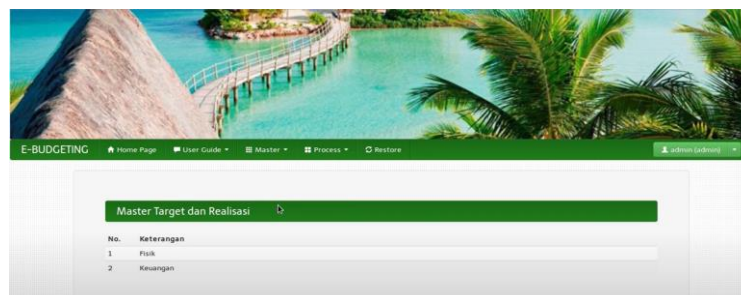
Gambar 7. Halaman Master Jenis Belanja

Halaman ini digunakan untuk memasukkan sub jenis belanja dalam sistem e-budgeting.



Gambar 8. Halaman Master Sub Jenis Belanja

Halaman ini digunakan untuk memasukkan jenis target dan realisasi dalam sistem e-budgeting



Gambar 9. Halaman Master Jenis Target dan Realisasi

Gambar 10. Halaman Data Umum

Halaman ini merupakan halaman detail dari anggaran belanja. Di halaman ini bisa terlihat statusnya aktif atau tidak.

No.	Data	Sub Jenis Belanja	Keterangan Anggaran	Total Anggaran	Status	Operator	Aksi
1	2016	Honorarium Panitia Pelaksana K.	Honorarium Panitia Kegiatan.	Rp 20.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
2	2016	Belanja Perjalanan Dinas.	Belanja Perjalanan Dinas Luar ..	Rp 63.300.000	Aktif	admin	Lihat Detail
3	2016	Belanja Perjalanan Dinas.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam.	Rp 128.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
4	2016	Belanja Makanan dan Minuman Ke.	Honor Pejabat Penerima Hasil P.	Rp 700.000	Aktif	admin	Lihat Detail
5	2016	Belanja Makanan dan Minuman Ke.	Honor Pejabat Pengadaan Barang.	Rp 1.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
6	2016	Belanja Makanan dan Minuman Ke.	Belanja Makanan dan Minuman Ke.	Rp 50.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
7	2016	Belanja Makanan dan Minuman Ra.	Belanja Makanan dan Minuman Ra.	Rp 5.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
8	2016	Belanja Cetak dan Penggandaan.	Belanja Penggandaan/Fotocopy/P.	Rp 30.000.000	Aktif	admin	Lihat Detail
9	2016	Belanja Cetak dan Penggandaan.	Belanja Cetak.	Rp 24.600.000	Aktif	admin	Lihat Detail
10	2016	Belanja Jasa Tenaga Teknis / N.	Honorarium Tenaga Perkebunan.	Rp 45.600.000	Aktif	admin	Lihat Detail

Gambar 11. Halaman Anggran Belanja

No.	Nama Program	KPA	PPTK	Tahun	Pagu Anggaran	Operator	Aksi
1	Peningkatan Kualitas Per...	Fathruhman, S.E	Deny Indrayana, S.H	2016	Rp 500.200.000	admin	Lihat Detail, Export Excel

Gambar 12. Halaman Laporan

4. KESIMPULAN

Hasil wawancara dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa melalui e-Village Budgeting dimulai dari tahap perencanaan melalui tilik dusun, Musdes, Musrenbangdes dan menjadi RKPDesa hingga RAPBDesa dan disetujui oleh camat menjadi APBDesa, barulah operator mengentry RPD ke e-Village Budgeting. Tahap kedua yaitu pencairan APBDesa yang terdiri dari dua tahap, penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa an operator e-Village Budgeting melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Bendahara desa juga harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada kepala desa yang kemudian disalurkan kepada bupati melalui DPM. Kepala desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui DPM setiap akhir tahun anggaran. Penerapan e-Village Budgeting ini membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, pola perencanaan desa lebih terarah dengan perencanaan sebelumnya.

REFERENCES

- [1] S. Supiyandi, M. Zen, C. Rizal, and M. Eka, "Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode

- Waterfall,” JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer), vol. 9, no. 2, pp. 274–280, 2022.
- [2] D. A. Luta, S. M. B. Sitepu, and A. S. Harahap, “Pemanfaatan Kompos Dalam Pembudidayaan Bawang Merah Pada Pekarangan Rumah Di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge,” J. PRODIKMAS Has. ..., vol. 5, pp. 32–35, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/5746>
- [3] Supiyandi and B. Fachri, “Aplikasi Pengolahan Citra Perbaikan Kualitas Image Citra Digital Menggunakan Metode Harmonic Mean Filter,” J. Tek. dan Inform., vol. 5, no. 1, pp. 58–62, 2018.
- [4] T. Limbong et al., Sistem Pendukung Keputusan: Metode & Implementasi. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- [5] D. Setiawan, “Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya,” J. SIMBOLIKA Res. Learn. Commun. Study, vol. 4, no. 1, pp. 62–72, 2018.
- [6] S. Supiyandi, C. Rizal, M. Zen, and M. Eka, “Pelatihan Perangkat Desa Dalam Penerapan Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Desa,” JMM (Jurnal Masy. Mandiri), vol. 6, no. 3, pp. 2346–2356, 2022.
- [7] C. Rizal, S. Supiyandi, M. Zen, and M. Eka, “Perancangan Server Kantor Desa Tomuan Holbung Berbasis Client Server,” Bull. Inf. Technol., vol. 3, no. 1, pp. 27–33, 2022.
- [8] D. S. Sari and M. G. Saragih, “Look For Tourism Development Model Derived Bolon Waterfall Tourism Development Model And Community-Based Ecotourism (Look For Tourism Development Model Derived Bolon Waterfall And Community-Based Ecotourism In The Village Tomuan Holbung District Bandar,” no. September 2018, pp. 177–182, 2020.
- [9] & M. G. S. Dian Septiana Sari, “Model Pengembangan Wisata Berbasis Ekowisata Dan Komunitas (Mencari Model Pengembangan Wisata Air Terjun Turunan Bolon Berbasis Ekowisata Dan Komunitas Di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan),” J. Bisnis Adm., vol. 7, no. 1, pp. 9–19, 2018.
- [10] Sunarsip. 2001. Corporate Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. Media Akuntansi, No. 17/Th. VII, pp. II-VII.
- [11] Septiyani, Ayu Dwi. 2017. Pengaruh Penggunaan E-Village Budgeting terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- [12] Nasution. 2003. Metode Penelitian Natuiralistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- [13] Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003
- [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- [18] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- [19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [20] Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [21] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [22] C. Rizal, S. Supiyandi, M. Zen, and M. Eka, “Perancangan Server Kantor Desa Tomuan Holbung Berbasis Client Server,” Bulletin of Information Technology (BIT), vol.3, no. 1, pp. 27–33, 2022.
- [23] R. Pressman, Rekayasa Perangkat Lunak: pendekatan praktisi, Buku 1. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.